



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tahun 2014 lalu merupakan pesta demokrasi serta tahun yang menentukan selama lima tahun ke depan bagi Indonesia, karena pada tahun 2014 diadakan pemilihan umum untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya.

Setelah melalui proses pemilu yang cukup panjang, pada 22 Juli 2014 Indonesia telah memiliki Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Supriyanto (2014, para. 1) menuliskan sesuai dengan hasil perhitungan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang dalam Pemilihan Presiden 2014.

Selang tiga bulan setelah ditetapkannya Joko Widodo – Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU, pasangan nomor urut 2 tersebut resmi dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 20 Oktober 2014. Joko Widodo dan Jusuf Kalla sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) periode 2014-2019 setelah membaca sumpah dan menandatangani berita acara (Wiwoho, 2014, para. 1).

Awal pemerintahan Indonesia baru telah dimulai. Setelah proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, rakyat Indonesia menanti janji-janji yang dikeluarkan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla melalui visi dan misi yang pasangan tersebut pakai pada masa kampanye.

Selain menanti janji, rakyat Indonesia juga menilai kinerja selama 100 hari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut Soempeno (2009, h. 60), 100 hari pemerintahan merupakan batasan waktu yang dianggap sebagai patokan awal apakah sebuah pemerintahan dapat dianggap sukses atau tidak.

Selama 100 hari pemerintahan, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengeluarkan beberapa kebijakan. Lingkaran Survei Indonesia (2015) menyatakan selama 100 hari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, publik memberi tiga rapor merah dan dua rapor biru.

Tiga bidang yang mendapat rapor merah yakni ekonomi, politik dan hukum. Pada ketiga bidang tersebut, kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bawah 50%. Dari ketiga bidang, kepuasan publik paling rendah terletak pada bidang hukum. Sebanyak 40,11% publik merasa puas, sedangkan 53,11% menyatakan tidak puas atau kecewa. Salah satu yang membuat rendahnya kepuasan di bidang hukum adalah Joko Widodo dinilai tidak tegas terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Joko Widodo terkesan kurang maksimal dalam menghindari pelemahan atau kriminalisasi KPK pada saat ini.

Di bidang ekonomi, publik yang merasa puas terhadap kinerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya sebesar 47,29%. Rendahnya kepuasan publik pada bidang ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), ketika harga minyak dunia sedang turun. Walaupun

pemerintah pada akhirnya menurunkan harga BBM, bagi publik harga pokok tetap naik dan membebani mereka.

Pada bidang politik, sebesar 45,30% menyatakan puas terhadap kinerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sementara mereka yang menyatakan tidak puas sebesar 49,72%. Hal tersebut terjadi karena gonjang-ganjing politik akibat pertentangan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di tubuh parlemen. Selain itu, ketidakpuasan publik pada bidang politik juga terkait dengan dengan kualitas para menteri yang dianggap minus dan terlalu banyak konflik politik serta energi yang terbuang akibat kasus Budi Gunawan dan KPK yang berlarut-larut.

Rapor biru pada 100 hari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah pada bidang sosial dan keamanan. Di bidang sosial, publik yang merasa puas sebesar 53,86% terkait dengan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sementara publik yang menyatakan tidak puas sebesar 40,12 %.

Di bidang keamanan, publik yang menyatakan puas terhadap kinerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebesar 57,40%. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya isu besar terkait keamanan yang terganggu. Sedangkan publik yang tidak puas sebesar 33,14%.

Lebih lanjut, kebijakan dari Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dinilai positif oleh publik adalah aksi penenggelaman kapal asing yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Hal tersebut berdasar pada

hasil survei yang dikeluarkan oleh Puspol yakni sebanyak 45% responden menyatakan setuju akan aksi tersebut, 20% responden menyatakan sebagai sebuah bentuk penegasan dan 34% responden menilai aksi penenggelaman harus dilakukan sesuai prosedur (Muzakki, 2015, para. 5, para. 6).

Menurut Sudiyono (2006, h. 3) sebuah kebijakan menjadi isu karena adanya perbedaan pandangan di antara para *stakeholders*. Dengan demikian, secara teknis dalam analisis kebijakan, isu dapat dimaknai sebagai sebuah kontroversi. Hal tersebut merupakan keadaan ketika suatu masalah dianggap oleh kelompok tertentu sebuah masalah, sementara kelompok lain tidak menganggap itu sebagai sebuah masalah.

Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan Pemilihan Presiden 2014 tidak dengan cara yang mulus. Pasangan tersebut menang disertai dengan situasi politik di Indonesia yang kurang baik. Waskita (2014, para. 4-8) menjelaskan bahwa satu hari sebelum Pemilihan Presiden 2014, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang Undang MD3. Hal tersebut yang memicu terbelahnya parlemen antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Koalisi Merah Putih merupakan koalisi yang berisikan fraksi-fraksi pendukung Prabowo-Hatta Rajasa di Pemilihan Presiden 2014 yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKS, Demokrat, dan PBB. Sementara Koalisi Indonesia Hebat merupakan partai politik yang mengusung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang terdiri dari PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI.

Kondisi tersebut memungkinkan media untuk mengekspos kemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang disertai dengan situasi politik di Indonesia yang

tidak baik. Menurut Kusumaningrat (Kusuma, 2014, h.2) peristiwa yang mengandung pertentangan akan menarik perhatian publik.

Media dalam mengekspos isu atau peristiwa akan berdasar pada nilai-nilai berita. Menurut Ishwara (2007, h. 53-58) peristiwa-peristiwa yang memiliki nilai berita adalah peristiwa yang mengandung konflik, kemajuan dan bencana, konsekuensi, kemasyhuran dan terkemuka, saat yang tepat (*timeliness*) dan kedekatan (*proximity*), kesegaran (*freshness*), keganjilan, *human interest*, seks, dan aneka nilai.

Peristiwa mengenai kinerja 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengandung beberapa unsur nilai berita. Nilai berita yang terkandung antara lain:

1. Kemasyhuran dan terkemuka: Sosok Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden menjadi sorotan berbagai media.
2. Konsekuensi: pemberitaan mengenai kinerja 100 hari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberi dampak pada masyarakat Indonesia.

Selain itu, menurut Kusuma (2014, h. 1-2) isu kebijakan pemerintah bisa menarik perhatian khalayak karena di dalamnya mengandung aspek politik, dan juga berhubungan dengan adanya perubahan dan demokrasi.

Dari berbagai macam media yang ada di Indonesia, peneliti memilih *Koran Tempo* dan *Media Indonesia* sebagai bahan untuk menganalisis bagaimana kedua media tersebut mengonstruksi kinerja 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Korporat Tempo (2015) menjelaskan Goenawan Mohamad dan kawan-kawan mendirikan *Majalah Tempo* pada tahun 1971, dan kemudian pada tahun 2001 didirikanlah surat kabar yang bernama *Koran Tempo*.

Goenawan Mohamad merupakan seorang sastrawan Indonesia dan juga pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), namun pada 15 Mei 2014, Goenawan Mohamad memutuskan untuk keluar dari PAN dan berhenti dari keanggotaan partai karena ia kecewa terhadap PAN yang menurutnya sudah tidak sesuai dengan tujuan awal didirikannya partai tersebut (Sadikin, 2014, para. 1-2).

Dalam liputan khusus mengenai kinerja 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, *Koran Tempo* membagi pemberitaan menjadi beberapa fokus ulasan. Fokus yang diambil oleh *Koran Tempo* adalah pada bidang politik, hukum, ekonomi dan kelautan. Terdapat lima pemberitaan terkait kinerja 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, antara lain, “Tak Henti Dijepit Koalisi”, “Masih Punya Efek Gentar”, “Ponten Merah Pemberantasan Korupsi”, “Berakhirnya Era Subsidi”, dan “Pekerjaan Rumah Susi Setelah Menghadang Pencurian Ikan”.

*Media Indonesia* adalah surat kabar nasional yang terbit sejak 19 Januari 1970 dan awalnya hanya terdiri dari empat halaman dengan pembahasan yang masih terbatas (Media Indonesia, 2015). Sebelum Surya Paloh memiliki *Media Indonesia*, pada tahun 1985 Surya Paloh mendirikan surat kabar yakni *Prioritas*, namun pada tanggal 29 Juni 1987 *Prioritas* dibredel karena pemberitaan di surat kabar *Prioritas* terlalu bebas dan dimanfaatkan Surya Paloh untuk mendobrak sistem politik Orde Baru (Hisyam, 2014, h. 367-368). Lebih lanjut menurut

Hisyam (2014, h. 372) pada tahun 1989, Surya Paloh bertemu dengan Tengku Yousli Syah selaku pemilik *Media Indonesia* yang terbit di Jakarta dan kemudian mencapai kesepakatan untuk bekerja sama di bawah naungan PT Media Nusa Purnama. Surya Paloh merupakan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam mendukung Joko Widodo sebagai Presiden pada pemilu 2014 (Wijaya, 2014, para. 4, para. 14, para. 15).

*Media Indonesia* mengulas kinerja 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga dibagi dengan fokus ulasan yang berbeda. *Media Indonesia* fokus membahas kinerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada bidang kesejahteraan rakyat dan ekonomi. Terdapat empat pemberitaan terkait kinerja 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, antara lain, “Pembenahan Terus Berjalan”, “Agar Gebrakan tidak Layu sebelum Berkembang“, “Dorong Sawit Selamatkan Defisit”, dan “Proaktif Kawal CPO”.

Penelitian ini fokus pada *time frame* Jumat 30 Januari 2015, karena kedua surat kabar membahas kinerja 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada hari yang sama. Dalam meneliti pemberitaan di *Koran Tempo* dan *Media Indonesia*, peneliti menggunakan metode *framing* milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Para pemilik media yang berbasis pasar tidak ada keraguan memiliki kekuasaan mutlak atas isi dan bisa meminta apa yang ingin mereka masukkan atau dikeluarkan (McQuail, 2011, h. 22).



Menurut Eriyanto (2011, h. 2) media bukanlah sebuah saluran bebas. Media bukanlah seperti apa yang diperlihatkan, memberitakan sesuatu dengan apa adanya, cermin dari sebuah realitas. Media justru mengonstruksi sebuah realitas. Ada peristiwa yang diberitakan media, namun ada pula peristiwa yang tidak diberitakan. Ada peristiwa yang dimaknai secara berbeda, dengan menggunakan narasumber yang berbeda dan dengan titik fokus perhatian yang berbeda.

Analisis *framing* dapat digunakan untuk melihat bagaimana suatu realitas dikonstruksi oleh media. Dengan menggunakan cara dan teknik seperti apa peristiwa ditekankan, diberitakan dan ditonjolkan. Apakah ada pemberitaan tersebut ada bagian yang dihilangkan, luput, atau bahkan tidak dimunculkan dalam pemberitaan (Eriyanto, 2011, h. 3).

Berdasarkan kutipan tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana konstruksi realitas yang dibangun oleh *Koran Tempo* yang saat ini pendirinya tidak terafiliasi oleh partai politik dan *Media Indonesia* yang pendirinya terafiliasi pada satu partai politik memberitakan kinerja 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan, rumusan masalah penelitian ini mencakup:

Bagaimana *Koran Tempo* dan *Media Indonesia* mengonstruksi kinerja 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

Mengetahui dan menjelaskan bagaimana *Koran Tempo* dan *Media Indonesia* mengonstruksi kinerja 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Signifikansi Akademis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu komunikasi khususnya mengenai penelitian analisis *framing* pada media massa. Analisis ini melihat bagaimana cara wartawan menyusun fakta, mengisahkan fakta, menulis fakta, dan menekankan fakta, guna mengetahui secara detil konstruksi yang dilakukan oleh media massa.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca agar mengetahui dan memahami bagaimana cara media massa dalam mengonstruksi sebuah peristiwa.